

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMEDIASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Risman<sup>1)</sup>  
Kamaliah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau

<sup>2)</sup> Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau

**Abstrak.** *This study aims to analyze the factors that affect the quality of financial reporting with organizational commitment as an Intervening variabel in the local governments Kampar. This study population is a civil servant of financial report in the Kampar regency with the use of Census methodh with total sample of 84 respondents. The variables used in this study are the Quality of Financial Reporting as dependent variable and Human Resources Competency, Internal Control System, Utilization of Information Technology, and Organizational Commitment as independent variable.s The analysis tool used is descriptive and qualitative analysis using tools WarpPLS 5 . The result using test coefisient path (Path Coefficient) and value significance (P-value) indicated that the Organizational Commitment, Human Resources Competency and and Utilization of Information Technology have positive and significant inpact diretcky to the the quality of financial Reporting, but Internal Control System doesn't have significant effect. Human Resources Competency and Utilization of Information Technology through organizational commitment as an intervening variable have significant effects indirectly to the the quality of financial Reporting.*

**Keyword:** *Quality of Financial Reporting, Organizational Commitment, Human Resources Competency , Internal Control System and Utilization of Information Technology.*

## PENDAHULUAN

Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik merupakan salah satu dinamika perkembangan sektor publik. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan ke-berhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggara-an pemerintahan untuk

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah

merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Fenomena kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia dari tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) oleh BPK yang di terbitkan tahun 2015 dari 504 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD Tahun 2014. Secara keseluruhan, berdasarkan IHPS I Tahun 2015 pemerintah provinsi memiliki persentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi, yaitu 76%, dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten yaitu 62% dan 44%.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan opini WTP dari 48% ke 76%, untuk pemerintah kabupaten terjadi peningkatan dari 26% ke 44% dan untuk pemerintah kota terjadi peningkatan dari 37% ke 61%. Kondisi ini menggambarkan usaha pemerintah daerah menuju arah perbaikan dalam

menyusun laporan keuangannya. Sekalipun terjadi peningkatan opini di tingkat kabupaten, tetapi masih terdapat beberapa kabupaten yang masih memperoleh opini WDP. Salah satunya Kabupaten Kampar, jika dilihat dari kepemimpinan tahun 2010-2014 sudah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan, akan tetapi opini yang di peroleh kabupaten kampar atas laporan keuangan tersebut masih tetap pada posisi WDP. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut. Jika dibandingkan dengan pencapaian target opini RPJMN 2010-2014, hal tersebut tidak mencapai target 100%, artinya di tahun 2014 seluruh pemda seharusnya sudah memperoleh opini WTP. Selaian itu Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2012 menetapkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang bertujuan untuk mendorong agar daerah berupaya mengelola keuangannya lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan selalu menetapkan APBD tepat waktu.

Pada lingkup wilayah Provinsi Riau, Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 4 kab/kota (30,77%) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 3 kab/kota (23,08%) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Pragraf Penjelasan (WTP-DPP). Sedangkan 6 kab/kota (46,15%) lainnya meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Permasalahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil

pemeriksaan BPK dalam rentang waktu tahun 2010 sampai tahun 2014, LKPD Kabupaten Kampar berada pada posisi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut. Untuk tahun 2014, Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar kembali memperoleh Opini WDP dari BPK RI di karenakan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar juga masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah di tetapkan diantaranya: (1) penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, (2) Informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga laporan memenuhi kriteria keterandalannya, (3) Sistem pengendalian intern yang baik sehingga mampu mengeliminasi terjadinya pelanggaran dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 2) Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 3) Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; 4) Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 5) Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM melalui Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 6) Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern melalui Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 7) Untuk

menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan;

## TELAAH PUSTAKA

### Grand Theory

#### Stewardship Theory

Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu Pemerintah Daerah. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori *stewardship* terhadap kemampuan manajemen dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian intern, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi yang diukur melalui kualitas laporan dalam konteks akuntabilitas.

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (*fundamental assumptions of stewardship theory*). Beberapa pertimbangan penggunaan *stewardship theory* sehubungan dengan masalah penelitian ini seperti pada tabel 1

Tabel 1 Asumsi Dasar Teori Stewardship

|  |  |
|--|--|
| <i>Manager as</i>                                  | <i>Stewards</i>  |
| <i>Approach To Governance</i>                      | <i>Sociological and Psychological</i>                  |
| <i>Model of human behavior</i>                     | <i>Collectivistic, pro-organizational, trustworthy</i> |
| <i>Managers Motivated by</i>                       | <i>Principal objectives</i>                            |
| <i>Manager-Principal Interst</i>                   | <i>Covergence</i>                                      |
| <i>Structures That</i>                             | <i>Facilitate and Empower</i>                          |
| <i>Owners Attitude</i>                             | <i>Risk-Propensity</i>                                 |
| <i>The Principal-Manager Relationship Relly on</i> | <i>Trust</i>   |

### *Reinventing Local Government Theory*

Prinsip-prinsip *Reinventing Government*, yaitu:

- a. Pemerintahan katalis  
Pemerintahan yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan peraturan, undang-undang dengan fungsi pelaksana (penyampai jasa dan penegakan). Kemudian pemerintah menggunakan metode kontrak, *voucher* hadiah, insentif pajak dan sebagainya untuk membantu organisasi publik untuk mencapai tujuan..
- b. Pemerintah adalah milik masyarakat.  
Mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol pelayanan yang dilakukan birokrasi.
- c. Pemerintah yang kompetitif.  
Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan diantara penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga, mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk melakukan perbaikan.
- d. Pemerintah berorientasi pada Misi  
Pemerintah yang berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administratif, seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan.
- e. Pemerintah berorientasi pada hasil  
Pemerintah yang *result oriented* mengubah fokus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mereka mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam besarnya anggaran.
- f. Pemerintah berorientasi pada pelanggan  
Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan yang harus diberi pelayanan dengan melakukan survey pelanggan, menetapkan standar pelayanan, memberi jaminan dan sebagainya. Pemerintah meredesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.
- g. Pemerintah wirausaha  
Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Pemerintah meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar menuntut *return on investment*.
- h. Pemerintah antisipatif  
Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang berpikir kedepan. Mereka mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.
- i. Pemerintahan desentralisasi

Pemerintah desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem, mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan atau pelaksana, untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.

- j. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar  
Pemerintah yang berorientasi pada pasar sering memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. Mereka menciptakan insentif keuangan, insentif pajak, pajak hijau, *affluent fees*.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang mempunyai karakteristik Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan dapat dipahami (PP 71 Tahun 2010). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala satuan kerja bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

### **Komitmen Organisasi**

Menurut Robbins (2008) Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Robbins (2008) menyebutkan 3 Dimensi komitmen organisasi, yaitu Komitmen Afektif, berkelanjutan, dan normatif yang sejalan dengan apa yang dikemukakan Meyer dan Herscovitch (dalam Coetzee, 2005, Agustini, Veronika 2009 dan Priansa, 2014) menggambarkan ketiga bentuk komitmen organisasional dan faktor-faktor yang mendasarinya

### **Kompetensi SDM**

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (PP 101 tahun 2000). Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumberdaya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan

berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah

Adapun yang menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia menurut (Hutapea dan Nurianna, 2008: 28) yaitu:

- a. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan
- b. Keterampilan individu
- c. Sikap kerja

#### **Sistem Pengendalian Intern**

Teori kegunaan keputusan melandasi bahwa laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern mengharuskan pemimpin di setiap daerah mengimplementasikan sistem pengendalian intern. Namun hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan lemahnya implementasi sistem pengendalian intern pemerintah serta masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang menguji hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI).

#### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Untuk memudahkan pengolahan data apalagi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan dibutuhkan alat pengolah data berupa teknologi informasi. Yang dimaksud dengan teknologi informasi disini adalah ketersediaan perangkat pendukung berupa penggunaan komputerisasi sebagai alat pengolah data keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Perangkat pendukung ini penting untuk memudahkan pencatatan transaksi, penjurnalan, pengikhtisaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengolah data dimana didalamnya ada perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

#### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Suwanda (2015), Evicahyani (2015) Afiah (2014) dan Widiastuti (2013) terhadap penelitian setiyawati (2013) menyimpulkan bahwa kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian Setiyawati (2013) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Rosalin (2011), Setiawati dan Sari (2014) memberikan kesimpulan yang inkonsisten dengan Arfianti (2011), Mustafa, dkk (2010), Akbar (2014), dimana Rosalin (2011), Setiawati dan Sari (2014) menemukan pemanfaatan teknologi, pengendalian intern, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh

signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan.

### **Kerangka Pemikiran**

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna LKPD tersebut. Penerapan SPIP yang baik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dihasilkan LKPD yang berkualitas. SPIP merupakan suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas LKPD tidak akan tercapai tanpa adanya sistem pengendalian intern yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan LKPD, dimana seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menghasilkan LKPD berkualitas adalah kompetensi SDM yang menjalankan SPIP dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Betapapun baiknya sistem dan standar yang dibuat, bila SDM yang menjalankan sistem dan standar tersebut tidak mempunyai kompetensi yang memadai maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang seharusnya.

### **Hipotesis**

1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi.
6. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi.
7. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi.

### **METODOLOGI**

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengelola laporan keuangan pada OPD Kabupaten Kampar dengan jumlah responden 84 orang. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh pengelola

laporan keuangan pada OPD Kabupaten Kampar.

### **Definisi Operasional variabel dan Pengukurannya**

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang mempunyai karakteristik Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan dapat dipahami (PP 71 Tahun 2010). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala satuan kerja bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Menurut Robbins (2008) Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Masih dari sumber yang sama, Allen dan Meyer menyatakan Komitmen Organisasi adalah sebuah konsep yang memiliki tiga dimensi yaitu *affective commitment* yang berhubungan dengan keterikatan emosi, *nomative commitment* yang berhubungan dengan keterikatan secara psikologis dan *continuance commitment* yang berhubungan dengan perhitungan terhadap biaya yang terkait jika meninggalkan organisasi.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (PP 101 tahun 2000). Sumberdaya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan

untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Sistem pengendalian intern menurut PP No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Untuk memudahkan pengolahan data apalagi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan dibutuhkan alat pengolah data berupa teknologi informasi. Yang dimaksud dengan teknologi informasi disini adalah ketersediaan perangkat pendukung berupa penggunaan komputerisasi sebagai alat pengolah data keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Perangkat pendukung ini penting untuk memudahkan pencatatan transaksi, penjurnalan, pengikhtisaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengolah data dimana didalamnya ada perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen berbentuk pertanyaan tertutup. Pengukuran menggunakan skala Likert dari 1 s.d. 5. responden diminta memberikan pendapat setiap butir pertanyaan, mulai dari tidak pernah sampai selalu. Alasan penggunaan skala Likert 1 s.d. 5 adalah untuk memudahkan responden dalam memilih jawaban.

**Tabel 2**  
**Skor Alternatif Jawaban**

| Alternatif Jawaban | Skor Pernyataan |         |
|--------------------|-----------------|---------|
|                    | Positif         | Negatif |
| Selalu             | 5               | 1       |
| Sering             | 4               | 2       |
| Agak Sering        | 3               | 3       |
| Jarang             | 2               | 4       |
| Tidak Pernah       | 1               | 5       |

Sumber : Data Olahan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data yang dikirimkan kepada Pengelola Laporan Keuangan pada seluruh OPD Kabupaten Kampar. Pengiriman daftar pertanyaan diantar langsung untuk menjaga kepastian sampainya daftar pertanyaan ke tangan responden. Dari 84 kuesioner yang dikirimkan, kuesioner yang kembali sebanyak 84 (100%). Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 84 (100%).

Analisis data dilakukan terhadap jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengolahan data.

**Tabel 2**  
**Deskripsi Variabel**

| Uraian                          | Rata-rata | Kategori      | N  |
|---------------------------------|-----------|---------------|----|
| Kualitas Laporan Keuangan       | 4,04      | Tinggi        | 84 |
| Komitmen Organisasi             | 3,60      | Tinggi        | 84 |
| Kompetensi SDM                  | 4,17      | Tinggi        | 84 |
| Sistem Pengendalian Intern      | 4,27      | Sangat Tinggi | 84 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 4,16      | Tinggi        | 84 |

Sumber : Olahan Data

Dari Tabel 2 dapat dilihat, bahwa rata-rata jawaban responden untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah 4,02 yang berkategori tinggi dengan indikator Memiliki Umpan Balik berada pada urutan tertinggi yaitu 4,25. Rata-rata jawaban responden untuk variable Komitmen Organisasi adalah 3,60 yang berkategori tinggi dengan dimensi afektif dengan indikator hubungan identitas dengan skor 4, 25. Rata-rata jawaban responden untuk variabel Kompetensi SDM adalah 4,18 yang berkategori tinggi pada dimensi pengetahuan dengan indikator pengelola keuangan OPD mengetahui dan memahami pertaturan-peraturan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaporan. Rata-rata jawaban responden untuk variabel Sistem Pengendalian Intern adalah 4.25 yang berkategori sangat tinggi dengan dengan indikator Perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap pencatatan akuntansi dan bukti-bukti yang ada. Rata-rata jawaban responden untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 4.17 yang berkategori tinggi dengan indikator proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. Dilihat dari rata-ratanya, variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya.

Untuk menghitung validitas pada pengolahan data dengan PLS dapat dilihat dari *cut off value* > 0,4 atau dalam beberapa kasus penelitian, *rule of thumb* validitas seringkali tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, untuk konstruk yang bersifat reflektif, indikator yang memiliki nilai loading faktor 0,40 sampai dengan 0,70 harus dipertimbangkan untuk di pertahankan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMEDIASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan tidak dihilangkan sebagai indikator sepanjang keberadaan indikator tersebut tidak menyebabkan nilai *average variance extracted* nya lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Seluruh kuesioner yang diolah menggunakan WARPLS 5 menunjukkan cut off value > 0,4 sehingga data dikatakan valid.

Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep atau suatu variabel (Cooper et,al 2006 Hair et al dalam Abdillah 2015). Reliabilitas dalam metode *Partial Least Square* (PLS) dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reability*nya.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

| Parameter                  | Kom   | SPI   | TI    | KO    | KL    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Cronbach Alpha</i>      | 0.432 | 0.640 | 0.657 | 0.477 | 0.846 |
| <i>Composite Reability</i> | 0.724 | 0.776 | 0.814 | 0.729 | 0.896 |

Sumber : Data Olahan

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reability* untuk semua variabel didalam penelitian ini berada diatas 0,70. Hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel yang diteliti memiliki konsistensi rebialitas internal (Ghazali, 2014) dan layak untuk di proses ke tahap selanjutnya.

Didalam metode *Partial Least Square* ini, setelah suatu model penelitian dinyatakan memenuhi kriteria uji validitas dan uji reabilitas, maka parameter lainnya adalah uji kesesuaian model (*goodness of fit*). Hasil pengujian kesesuaian model dapat dilihat pada tabel 4.berikut.

Tabel 4 Hasil Pengujian *Goodness Of fit*

| No | Parameter  | Hasil  | Cut off Value                               | Interprestasi |
|----|--|--------|---|---------------|
| 1  | Average path coefficient (APC)                         | 0.267  | P< 0,05                                     | Fit           |
| 2  | Average R-squared (ARS)                                | 0.244  | P< 0,05                                     | Fit           |
| 3  | Average adjusted R-squared (AARS)                      | 0.212  | P< 0,05                                     | Fit           |
| 4  | Average block VIF (AVIF)                               | 1.168  | acceptabl e if <= 5, ideally <= 3.3         | Ideal         |
| 5  | Average full collinearity VIF (AFVIF)                  | 1.554  | acceptabl e if <= 5, ideally <= 3.3         | Ideal         |
| 6  | Tenenhaus GoF (GoF)                                    | 0.366  | small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36 | Large         |
| 7  | Sympson's paradox ratio (SPR)                          | 0.714  | acceptabl e if >= 0.7, ideally = 1          | Fit           |
| 8  | R-squared contribution ratio (RSCR)                    | 0.828  | acceptabl e if >= 0.9, ideally = 1          | Fit           |
| 9  | Statistical suppression ratio (SSR)                    | 1.000  | acceptabl e if >= 0.7                       | Fit           |
| 10 | Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) | 0.857, | acceptabl e if >= 0.7                       | Fit           |

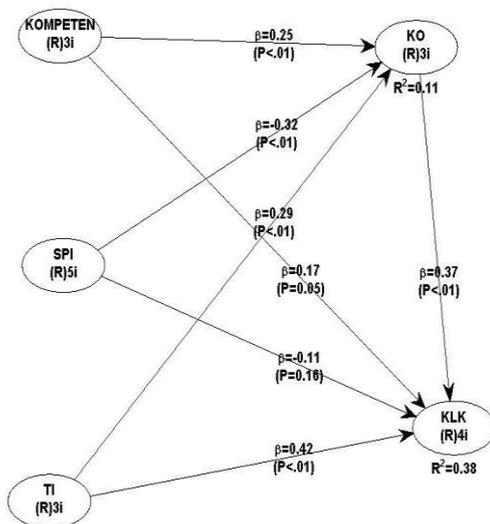
Sumber: Olahan Data

Dari data Tabel 4 dapat dilihat bahwa pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) sudah terpenuhi indikator pada model tersebut dengan nilai GoF 0,366 (tinggi).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMEDIASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Banyak cara atau metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Diantara cara tersebut, dalam statistik ada suatu alat atau metode yang biasa digunakan dikenal dengan pengujian hipotesis. Setelah serangkaian uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian parameter lainnya (uji kesesuaian model), maka semua hipotesis akan diuji untuk kemudian disimpulkan. Adapun hasil pengujian hipotesis selengkapnya dapat dijabarkan pada gambar 1:

Gambar 1. Model Penelitian



Tabel 5. Correlation Among Latent Variables

| No | Jalur      | Direct Effect |         | Indirect Effect |         |
|----|------------|---------------|---------|-----------------|---------|
|    |            | Koefisien     | P-value | Koefisien       | P-value |
| 1  | Komp → KLK | 0,171         | 0,05    | 0,075           | 0,075   |
| 2  | SPI → KLK  | -0,106        | 0,16    | 0,074           | 0,055   |
| 3  | TI → KLK   | 0,419         | <0,001  | 0,075           | 0,078   |
| 4  | KO → KLK   | 0,370         | <0,001  |                 |         |

Sumber: Olahan Data

Berdasarkan tabel pertama mengenai hasil pengujian koefisien jalur (*path coefficients*) dan tabel kedua mengenai nilai signifikansinya, maka

disajikan pembahasan hipotesis berikut ini:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien *direct effect* Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan (jalur c) pada model (1) adalah sebesar 0,171 dan  $P = 0,050$  yang berarti signifikan. Hasil estimasi model (2) menunjukkan koefisien *indirect effect* Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan (c'') turun menjadi 0,075 namun p-value 0,075 menjadi tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan persyaratan efek mediasi maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (*full mediation*).
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien *direct effect* sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Jalur c) pada model (1) adalah sebesar -0,106 dan P-value sebesar 0,16 yang berarti tidak signifikan. Berdasarkan kaidah Baron dan Kennes (1986), pengujian efek mediasi dapat dilakukan jika efek utama (pengujian langsung) variabel independen terhadap dependen adalah signifikan. Jika tidak terjadi signifikan maka pengujian efek mediasi tidak dapat dilakukan.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien *direct effect* Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (jalur c) pada model (1) adalah sebesar 0,499 dan  $p < 0,01$  yang berarti signifikan. Hasil estimasi model (2) menunjukkan koefisien *indirect effect* Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (c'') berubah menjadi 0,075 dan p-value = 0,078 menjadi tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan

kesimpulan tentang mediasi maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (full mediation)

### Pembahasan

1. Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,175 dengan nilai signifikansi sama dengan 0,05. Koefisien Kompetensi SDM ( $\beta = 0,175$ ) memiliki pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM dapat meningkatkan kinerja yang dihasilkan, SDM (pengelola keuangan) yang berkompeten dapat meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang ekonomi tetapi jumlahnya masih terbatas, penempatan pegawai sudah dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi hanya saja karena keterbatasan jumlah pegawai dengan kualifikasi yang diinginkan, sehingga dalam penunjukkan pengelola keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diberdayakan SDM yang ada dengan diberikan pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kompetensi
2. Hasil pengujian terhadap hipotesis 2 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,104 dengan nilai signifikansi sama dengan 0,17. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 dan oleh sebab itu hipotesis 2 pada penelitian ini tidak di dukung.
3. Hasil pengujian terhadap hipotesis 3 menunjukkan bahwa Pemanfaatan

Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,44 dengan nilai signifikansi sebesar  $<0,001$ . Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan adanya pemanfaatan teknologi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

4. Hasil pengujian terhadap hipotesis 4 menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,373 dengan nilai signifikansi  $<0,001$ . Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini.
5. Hasil dari pengujian terhadap hipotesis 5 menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Dimana pengaruh langsung memiliki nilai  $\beta$  sebesar 0,19 dan signifikansi P-value 0,05, sedangkan pengaruh tidak langsung memiliki nilai  $\beta$  sebesar  $0,25 \times 0,37 = 0,09$  dengan nilai signifikansinya  $<0,001$  sehingga hipotesis 5 diterima.

6. Hasil dari pengujian terhadap hipotesis 6 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Dimana pengaruh langsung memiliki nilai  $\beta$  sebesar 0,10, signifikansi P-value 0,17 lebih besar dari 0,05, sedangkan pengaruh tidak langsung memiliki nilai  $\beta$  sebesar  $-0,32 \times 0,37 = -0,118$  dengan nilai signifikansinya  $< 0,001$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi berperan sebagai variabel yang tidak memberikan pengaruh tidak langsung antara variabel Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan sehingga hipotesis 6 ditolak. Berdasarkan kaidah Baron dan Kennes (1986), pengujian efek mediasi dapat dilakukan jika efek utama (pengujian langsung) variabel independen terhadap dependen adalah signifikan. Jika tidak terjadi signifikan maka pengujian efek mediasi tidak dapat dilakukan.
7. Hasil pengujian terhadap hipotesis 7 menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Dimana pengaruh langsung memiliki nilai  $\beta$  sebesar 0,44 dan signifikansi P-value  $< 0,001$ , sedangkan pengaruh tidak langsung memiliki nilai  $\beta$  sebesar  $0,29 \times 0,37 = 0,10$  dengan nilai signifikansinya  $< 0,001$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi berperan sebagai variabel yang memberikan pengaruh tidak langsung antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di dapatkan maka peneliti mendapatkan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan, artinya semakin tinggi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik kualitas laporan kualitas laporan keuangan.
2. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini bertentangan dengan beberapa penelitian yang ada. Pertentangan hasil tersebut bukan disebabkan oleh buruknya penerapan SPI
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan, artinya Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik.
4. Komitmen Organisasi memiliki pengaruh secara langsung terhadap variabel kualitas laporan keuangan, artinya pengaruh antara komitmen organisasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin tinggi komitmen organisasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik.
5. Komitmen organisasi berperan sebagai variabel yang mampu memberikan pengaruh tidak langsung antara variabel

Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

6. Tidak adanya pengaruh mediasi antara Komitmen Organisasi pada Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Komitmen organisasi berperan sebagai variabel yang mampu memberikan pengaruh tidak langsung (indirect) antara variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

#### Saran

Hal-hal yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam perekrutan pegawai diharapkan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada dan penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki pegawai
2. Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan untuk meningkatkan komitmen organisasi melalui penerapan *reward* dan *punishment*, penghasilan sesuai dengan beban kerja, serta promosi jabatan berdasarkan prestasi kerja.
3. Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengarahkan, mengawasi serta berperan penting dalam pencegahan terjadinya kesalahan yang berkelanjutan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi sudah telah baik dilakukan, tapi

masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai kualitas yang lebih baik.

5. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Di sisi lain, keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi sumber bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini telah mengungkap pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengambilan dan pengolahan data dalam penelitian ini terbatas pada 84 responden dalam lingkungan OPD Kabupaten Kampar dengan alat analisis adalah *Partial Least Square* (PLS). Kedepannya dapat dilakukan pengujian dengan banyak sampel di banyak lingkungan kerja dan alat analisis yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy. Jogiyanto, HM, 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Struktural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Andi. Yogyakarta
- Afiah, Nunuy. Rahmatika, Dien (2014) *Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implications On Good Government Governance (Research On Local Government Indonesia)*. *International Journal of*

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMEDIASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

---

- Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 1 (Dec.)*
- Arfianti, Dita, 2011. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)", Tesis, Semarang : PPs-UNDIP
- Evicahyani, Saung I. 2015, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Universitas Udayana. Tesis
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Mustafa 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM), pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Kendari. Jurnal S1 Ak Universitas Diponegoro
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2012 menetapkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID)
- Suwanda, Dadang 2015. Factors Affecting Quality Of Local Government Financial Statements To Get Unqualified Opinion (WTP) Of Audit Board Of The Republic Of Indonesia (BPK) Research Journal Of Finance And Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.4, 2015.
- Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Robbins, SP.2008. *Prilaku Organisasi;Edisi 12*, Penerjemah "Diana Angelica, Ria Cahyani dan Abdul Rasyid, Jakarta, salemba Emat. Judul asli : *Organizational Behavior, 12<sup>th</sup> ed. By Pearson Education, Inc, Uper Saddle River. New Jersey*
- Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang),, Semarang : PPs-UNDIP.
- Setiawati, Erma. Sari, Shinta Permata, 2014. " Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pegendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta" *Seminar Nasional dan Call Paper*
- Windiastruti, Ruri 2013. Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.